

**EFEKTIVITAS PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI DESA PLIKEN KECAMATAN
KEMBARAN KABUPATEN BANYUMAS**

**Neli Indriyani Choerun Nisa^{1*}, Zaula Rizqi Atika², Chamid Sutikno³, Indah Ayu Permana
Pribadi⁴, Lupita Ariantika Sari⁵**

^{1,2,3,4,5}Program Studi Administrasi Publik, Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto, Indonesia
[*neliindriyanichoerunnisa@gmail.com](mailto:neliindriyanichoerunnisa@gmail.com)

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas program keluarga harapan di Desa Pliken Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik Pemilihan Informan menggunakan purposive sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini meliputi data primer dan data skunder. Teknik analisis data menggunakan studi kasus. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori efektivitas menurut Sutrisni (2007) dengan fokus penelitian yaitu Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Pliken Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas. Hasil penelitian antara lain : (a) Pelaksanaan program, menunjukkan bahwa pihak pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) ditingkat kecamatan telah memahami fungsi dan tanggung jawabnya selain itu para Keluarga Penerima Manfaat (KPM) juga telah memahami Program Keluarga Harapan (PKH), (b) Tepat sasaran, sudah dapat dikatakan efektif dalam mencapai sasaran yang telah ditentukan sebelumnya yaitu sesuai dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan para KPM memiliki kriteria yang telah ditentukan oleh pemerintah, (c) Ketepatan waktu, menunjukkan bahwa di Desa Pliken telah dilaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH) sesuai dengan standart waktu yang telah ditentukan oleh pemerintah Banyumas yaitu tahun 2013, (d) Tercapainya tujuan, sudah berjalan dengan baik karena dengan adanya Program Keluarga Harapan (PKH) para KPM merasa terbantu dalam mengurangi beban pengeluaran sehingga dapat merasakan kesejahteraan sosial, (e) Perubahan nyata, dapat dikatakan efektif karena telah mampu memberikan perubahan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sehingga merasakan manfaat dan dampak yang positif dari bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam mengurangi beban pengeluaran dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan.

Kata kunci : Efektivitas, Kesejahteraan Sosial, PKH

Abstract

This study aims to evaluate the effectiveness of the Family Hope Program (Program Keluarga Harapan/PKH) in Pliken Village, Kembaran District, Banyumas Regency. Employing a descriptive qualitative methodology with purposive sampling, the research utilized multiple data collection techniques including observation, in-depth interviews, and documentation. Primary and secondary data sources were analyzed using a case study approach, drawing on Sutrisni's (2007) effectiveness theory. The research findings revealed five critical dimensions of program effectiveness: (a) Program Implementation: District-level administrators and beneficiary families demonstrated comprehensive understanding of program objectives and responsibilities; (b) Targeting Accuracy: The program effectively identified beneficiaries consistent with the Integrated Social Welfare Data (DTKS) and government-defined criteria; (c) Timely Execution: Program implementation adhered to Banyumas government's established 2013 timeline; (d) Goal Achievement: Beneficiary families experienced reduced expenditure burdens, facilitating improved social welfare; (e) Tangible Transformation: The program generated positive impacts by alleviating financial pressures in accessing healthcare and educational services. The study concludes that the Family Hope Program in Pliken Village demonstrates significant potential in addressing social welfare challenges through targeted, time-sensitive, and holistic intervention strategies.

Keywords : Effectiveness, Social Welfare, Family Hope Program (PKH)

PENDAHULUAN

Permasalahan kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Adapun faktor-faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya kemiskinan yaitu merosotnya standart perkembangan pendapatan perkapita secara global, menurunnya etos kerja dan produktivitas masyarakat, biaya kehidupan yang tinggi dan pembagian subsidi *in come* pemerintah yang tidak merata. Kemiskinan merupakan masalah yang ditandai oleh berbagai hal antara lain rendahnya kualitas hidup penduduk, terbatasnya kecukupan dan mutu pangan, terbatasnya dan rendahnya pelayanan kesehatan, gizi anak, ibu hamil dan rendahnya pelayanan pendidikan. Kemiskinan telah memberikan dampak yang beraneka ragam bagi masyarakat mulai dari pengangguran, tidak kriminal, kesehatan terganggu dan masih banyak lagi.

Kondisi perekonomian di Indonesia sempat mengalami keterpurukan pada saat awal adanya pandemi covid-19 pada tahun 2019 silam. Angka kemiskinan kembali mengalami kenaikan pada September 2020, dimana jumlah penduduk miskin mencapai 27,55 juta jiwa. Hal yang menjadi pemicu utama terjadinya lonjakan angka kemiskinan di Indonesia yaitu terhambatnya laju perekonomian negara akibat mobilitas yang sangat terbatas. Menurut data pada bulan September 2021 jumlah penduduk miskin berhasil ditekan dan mengalami penurunan ke angka 26,50 juta jiwa. Sementara jika dibandingkan dari tahun ke tahun angka penduduk miskin pada September 2021 menurun menjadi 1,05 juta jiwa terhadap September 2020 dan pada September 2022 kemiskinan mengalami lonjakan sebesar 0,20 yang dikarenakan adanya tekanan inflasi yang bersumber dari peningkatan harga komoditas global, khususnya energi dan pangan. (<https://www.cnbcindonesia.com/news/20230718074328-4-455199/orang-miskin-ri-turun-ini-lima-penyebabnya/amp>, diakses 7 Januari 2024).

Penduduk miskin sebagian besar berada di Pulau Jawa yaitu sebesar 13,94 juta orang. Pada tahun 2022 jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah menempati posisi ke 3 dari 34 Provinsi di Indonesia dengan jumlah 3 831,44 juta orang. Peringkat pertama diduduki oleh Jawa Timur dengan 4 181,29 juta orang dan peringkat kedua yaitu Provinsi Jawa Barat dengan jumlah penduduk miskin 4 070,98. Jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah menempati posisi ketiga setelah Jawa Timur dan Jawa Barat. Dari hal tersebut perlu adanya perhatian khusus dari pemerintah tidak hanya dibidang ekonomi saja tetapi juga dimulai dari persoalan kesehatan dan pendidikan. Masih tingginya angka kemiskinan di Jawa Tengah telah membuktikan bahwa di provinsi yang memiliki luas 32,801 km² masih memiliki kesenjangan sosial yang sangat tinggi.

Pemerintah pada masa jabatan Joko Widodo dalam usahanya untuk menurunkan tingginya angka kemiskinan di Indonesia terdapat beberapa program kebijakan sosial yaitu seperti Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sejahtera, dan sebagainya. Seluruh program tersebut memiliki tujuan untuk membantu masyarakat miskin. Pemerintah berharap dengan adanya program tersebut mereka dapat lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan hidup. Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya pemberantasan kemiskinan disetiap sektor mulai dari sektor pendidikan, kesehatan dan sektor ketahanan pangan. Bantuan tersebut berupa uang tunai yang disalurkan melalui pemberdayaan masyarakat. Persoalan kemiskinan memerlukan upaya penanganan yang serius agar ke depannya pemerintah dapat mengurangi angka kemiskinan yang ada di Indonesia. Dalam mengurangi kemiskinan pemerintah telah melakukan berbagai upaya yaitu dengan dilaksanakannya program berbasis perlindungan sosial kepada masyarakat yang berbentuk bantuan sosial dalam upaya mensejahterakan masyarakat miskin guna memperbaiki kualitas hidup masyarakat yang kurang mampu.

Program Keluarga Harapan (PKH) di Indonesia dimulai pada tahun 2007 yang bertujuan untuk mengentaskan masalah kemiskinan demi kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor II Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial pasal 1 Ayat (1) yang berbunyi : "Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan

sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program perlindungan sosial yang di luncurkan oleh pemerintah yang menyasar pada Keluarga Sangat Miskin (KSM) agar keluarga tersebut sadar tentang pentingnya pendidikan dan kesehatan untuk masa depan yang cemerlang. Program bantuan ini merupakan bantuan tunai bersyarat yang berkaitan dengan pendidikan dan kesehatan. Dalam jangka pendek Program Keluarga Harapan (PKH) diharapkan dapat membantu keluarga miskin dalam mengurangi beban pengeluaran guna mengatasi kemiskinan. Pada jangka menengah Program Keluarga Harapan (PKH) diharapkan dapat menghasilkan perubahan perilaku masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan sehingga dapat menciptakan generasi yang sehat dan pintar. Dalam jangka panjang Program Keluarga Harapan (PKH) diharapkan dapat memutus rantai kemiskinan melalui kualitas pada kesehatan dan pendidikan. (<https://jatengprov.go.id/beritadaerah/program-keluarga-harapan-akan-dibatasi-5-tahun/>, diakses 7 Januari 2024)

Pemerintah telah mengeluarkan beberapa bantuan sosial salah satunya adalah Program Keluarga Harapan (PKH). Program tersebut diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup dan mengentaskan permasalahan kemiskinan. Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program perlindungan sosial yang di luncurkan oleh pemerintah yang menyasar pada Keluarga Sangat Miskin (KSM) agar keluarga tersebut sadar tentang pentingnya pendidikan dan kesehatan untuk masa depan yang cemerlang.

Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) harus memenuhi kriteria yang telah ditentukan oleh Kementerian Sosial yaitu meliputi siswa Sekolah Dasar (SD), siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP), siswa Sekolah Menengah Atas (SMA), ibu hamil/menyusui, anak usia dini 0-6 tahun, lanjut usia mulai dari usia 60 tahun dan penyandang disabilitas terutama pada disabilitas berat. Data masyarakat miskin diperoleh dari pendataan rumah tangga miskin yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), yang kemudian hasil tersebut diseleksi kembali oleh pusat untuk memperoleh calon penerima Program Keluarga Harapan (PKH).

Besaran bantuan yang diberikan kepada penerima bantuan PKH juga cukup beragam, tergantung pada jumlah anggota yang telah diperhitungkan dalam penerima bantuan, baik dalam kriteria pendidikan, kesehatan maupun dalam kriteria kesejahteraan sosial. Besaran indeks/tahun mulai dari peserta pendidikan SD yaitu sebesar Rp 900.000, peserta pendidikan SMP yaitu sebesar Rp 1.500.000, peserta pendidikan SMA yaitu sebesar Rp 2.000.000, bantuan ibu hamil/menyusui Rp 3.000.000, bantuan anak usia 0-6 tahun Rp 3.000.000, bantuan lanjut usia Rp 2.400.000 dan yang terakhir bantuan untuk penyandang disabilitas yaitu sebesar 2.400.000. besarnya jumlah bantuan yang di dapatkan bisa berubah dikemudian hari sesuai dengan kondisi keluarga penerima manfaat pada saat itu atau apabila penerima manfaat tidak dapat memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Kabupaten Banyumas sendiri Program Keluarga Harapan (PKH) dimulai dari tahun 2013 hal tersebut dikarenakan kebijakan dan sistem pemerintah yang belum siap. Terdapat 27 Kecamatan di Kabupaten Banyumas yang mulai menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), di Kabupaten banyumas ada angka kemiskinan yang masih terus naik dari tahun 2019-2021 dan mengalami penurunan pada 2022, jumlah penduduk miskin dan presentase penduduk miskin terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun dari jumlah 211,60 pada 2019 menjadi 232,90 pada 2021. Penyebab kenaikan jumlah penduduk miskin sebagian besar dikarenakan dampak dari pandemi covid-19. Tingginya jumlah kemiskinan yang ada di Kabupaten Banyumas juga mengakibatkan tingginya angka pengangguran karena banyaknya masyarakat yang terkena PHK, dan para pedagang mengalami sepi pembeli yang terdampak dari adanya pandemi covid-19. Namun tingkat kemiskinan di Kabupaten Banyumas mengalami penurunan sebanyak 0,82 persen pada 2022. Hal ini merupakan bukti adanya manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Banyumas.

Meskipun jumlah penduduk miskin di Kabupaten Banyumas terus mengalami kenaikan namun jumlah penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) justru terus mengalami penurunan pada tahun 2019-2021. Jumlah penerima manfaat dari sebanyak 101.574 pada 2019 menjadi 83.638 pada 2021. Hal ini membuktikan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) yang dilaksanakan di Kabupaten Banyumas berdampak baik, namun beda halnya dengan salah satu desa yang ada di Kabupaten Banyumas yaitu Desa Pliken Kecamatan Kembaran yang memiliki penerima PKH dengan jumlah tertinggi yaitu sebanyak 570 KPM. Penyebab banyaknya KPM di Desa Pliken karena desa tersebut memiliki tingkat kemiskinan paling tinggi di Kecamatan Kembaran. Untuk mengatasi masalah tersebut diperlukan tindakan dari pemerintah agar bantuan Program Keluarga Harapan dapat berjalan efektif untuk mengurangi angka kemiskinan. Kontribusi penelitian ini secara teoritis memberikan pemahaman mendalam tentang implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di tingkat desa, menghasilkan model evaluasi kebijakan sosial yang komprehensif, dan menyediakan rekomendasi empiris bagi pengambil kebijakan dalam merancang intervensi penanggulangan kemiskinan yang lebih efektif dan berkeadilan.

TINJAUAN PUSTAKA

Administrasi Publik merupakan suatu ilmu sosial yang membahas dan mempelajari tiga hal penting dalam kehidupan bernegara yang meliputi 3 lembaga yaitu legislatif, yudikatif, dan eksekutif dan beberapa hal yang berkaitan dengan publik, tujuan negara, serta etika yang mengatur penyelenggara negara, Doni tua dan Piki Darma (2021). Sedangkan menurut Leonard D. White mengungkapkan bahwa "*Administration is a common process to all groups effort, public or private, civil or military*" yang memiliki arti Administrasi adalah proses umum untuk semua usaha kelompok, publik atau swasta, sipil atau militer, Intan Fitri Meutia (2017). Secara sederhana administrasi publik dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang bagaimana pengelolaan suatu organisasi. Marshall E. Dimock, Gladys O. Dimock dan Louis W. Koenig (1958), menyatakan "administrasi publik merupakan suatu kegiatan pemerintah dalam melaksanakan kekuasaan politiknya".

Berdasarkan beberapa definisi administrasi publik di atas, dapat disimpulkan bahwa administrasi publik dapat diartikan sebagai "suatu proses usaha kelompok yang dilakukan untuk melaksanakan kebijakan pemerintah". Kelompok yang dimaksud pada definisi di atas meliputi aparatur negara, anggota legislatif, anggota yudikatif, anggota eksekutif atau masyarakat yang berkepentingan dengan pelaksanaan kebijakan pemerintah. Administrasi publik merupakan ilmu sosial yang dinamis, yang selalu mengalami perubahan dengan mengikuti perubahan zaman, peradaban dan teknologi. Dimana administrasi publik dapat diartikan sebagai pelayanan untuk melayani masyarakat umum.

Dalam perjalanan penyelenggaraan peran administrasi publik banyak mengalami perkembangan yang hingga saat ini telah mengalami beberapa pergeseran paradigma, Mulai dari model klasik atau biasa disebut dengan *Old Public Administration (OPA)*, *New Public Manajemen (NPM)*, *New Public Service (NPS)* hingga sampai pada *good governance* yang mulai berkembang sejak pertengahan tahun 1990-an hingga saat ini. Nicholas Henry (2004) mendefinisikan 5 paradigma dalam administrasi publik yaitu sebagai berikut:

a. Dikotomi politik/ administrasi (1900-1926)

Penekanan paradigma yang pertama yaitu pada lokus (tempat) dimana administrasi seharusnya berada, dalam paradigma ini administrasi publik harus berlokus pada birokrasi pemerintah yang tidak dipersoalkan apa fokusnya. Tokoh penting pada periode ini adalah Frank J. Goodnow dan Leonard D. White.

b. Prinsip-prinsip administrasi (1927-1937)

Penekanan paradigma yang kedua yaitu pada fokus dimana dalam paradigmanya lokus administrasi publik tidak menjadi persoalan dikarenakan semua prinsip administrasi dianggap dapat berlaku di semua pengaturan administrasi. Tokoh penting pada periode ini adalah Willoughby, Gullik dan Urwick.

c. Administrasi publik sebagai ilmu politik (1950-1970)

Pada paradigma ketiga yaitu terdapat pembaruan dari definisi lokus yaitu pada birokrasi pemerintah, tetapi melepaskan hal yang telah berkaitan dengan fokus. Tokoh penting pada periode ini adalah Chester I Barnard, Dwight Waldo, Herbert Simon.

d. Administrasi publik sebagai ilmu manajemen (1959-1970)

Pada paradigma yang keempat yaitu terdapat alternatif opsi manajemen sebagai suatu paradigma. Manajemen menyediakan suatu fokus bukan lokus, pada paradigmanya administrasi telah kehilangan identitas dan keunikan dalam konteks manajemen yang luas. Tokoh dominan pada periode ini adalah Edward Litchfield dan John D. Millet.

e. Administrasi publik sebagai administrasi publik (1970-)

Pada paradigma yang kelima yaitu administrasi publik lebih fokus pada teori organisasi serta ilmu manajemen. Sedangkan lokusnya ada pada kepentingan publik dan kesejahteraan publik. Tokoh penting dalam periode ini adalah Luther Gullik dan *The National Association Of Schools Of Public Affairs and Administration* (NASPAA).

Dari beberapa penjelasan mengenai paradigma yang disebutkan oleh Nicholas Henry dapat disimpulkan bahwa adanya paradigma baru disebabkan karena paradigma-paradigma sebelumnya masih memiliki kelemahan pada bagian-bagian tertentu sehingga adanya paradigma baru diharapkan dapat menutup kelemahan-kelemahan tersebut.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kebijakan merupakan rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak (mengenai pemerintah, organisasi, dsb) pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran.

Easton (1965) dalam (Taufiqurokhman, 2014) memberikan definisi kebijakan publik sebagai *the authoritative allocation of values for the whole society* atau dapat diartikan sebagai pengalokasian nilai-nilai secara paksa kepada seluruh anggota masyarakat. Sedangkan menurut Laswell dan Kaplan (1950) dalam (Taufiqurokhman, 2014) juga mengartikan kebijakan publik sebagai *projected of goal, value, and practice* atau dapat diartikan bahwa sesuatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dalam praktek-praktek yang terarah. Kebijakan publik merupakan "hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya" Robert Eyestone (1971). Sedangkan menurut Thomas R. Dye (1978) dalam (Mustari, 2015) yang mengatakan bahwa "Kebijakan publik merupakan apapun yang telah dipilih oleh pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Menurut Nugruho dalam (Taufiqurokhman, 2014) ada dua karakteristik dari kebijakan publik, yaitu :

- a. Kebijakan publik merupakan unsur yang penting dalam bidang politik dan merupakan sesuatu yang mudah untuk dipahami, karena memiliki makna yaitu hal-hal yang dikerjakan untuk mencapai tujuan nasional dan dilakukan dalam waktu atau dapat diartikan bahwa kebijakan publik merangkum proses tentang bagaimana pekerjaan tersebut dirumuskan, diterapkan dan dinilai hasilnya.
- b. Kebijakan publik merupakan kebijakan yang mengatur kehidupan bersama atau kehidupan publik, dan bukan mengatur kehidupan orang tertentu atau golongan, kebijakan publik juga merupakan sesuatu yang mudah diukur, karena ukurannya jelas yakni sejauh mana kemajuan pencapaian cita-cita sudah ditempuh.

Terdapat banyak sekali pengkategorian kebijakan publik berikut ini kategori kebijakan publik menurut beberapa ahli :

James E. Anderson (1970) dalam (Taufiqurokhman, 2014) menyampaikan kategori kebijakan publik sebagai berikut :

a. Kebijakan Substantif dan Kebijakan Prosedural

Kebijakan substantif merupakan kebijakan yang berhubungan dengan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah atau substansi masalah yang akan dihadapi oleh pemerintah. Sedangkan kebijakan prosedural adalah bagaimana kebijakan substantif tersebut dapat dijalankan atau siapa yang akan diberi kewenangan untuk mengambil tindakan.

b. Kebijakan Distributif dan Kebijakan Regulatori versus Kebijakan Redistributif

Kebijakan distributif merupakan suatu kebijakan yang berhubungan dengan distribusi pelayanan atau kemanfaatan pada masyarakat atau individu. Kebijakan regulatori merupakan kebijakan yang berupa pembatasan atau pelarangan terhadap perilaku seorang atau sekelompok masyarakat. Sedangkan kebijakan redistributif yaitu suatu kebijakan yang mengatur alokasi kekayaan, pendapatan, kepemilikan dan hak-hak diantara berbagai kelompok dalam masyarakat.

c. Kebijakan Materal dan Kebijakan Simbolik

Kebijakan materal merupakan kebijakan yang memberikan keuntungan sumber daya pada kelompok sasaran atau dapat digambarkan sebagai usulan tindakan dan kerangka kerja yang telah menjadi manfaat nyata bagi kelompok sasaran. Sedangkan kebijakan simbolik merupakan kebijakan yang memberikan manfaat simbolis kepada kelompok sasaran.

d. Kebijakan yang berhubungan dengan barang umum (*public goods*) dan barang privat (*privat goods*)

Kebijakan *public goods* merupakan suatu kebijakan yang mengatur pemberian barang atau pelayanan publik, dalam ekonomi barang publik adalah barang yang dimanfaatkan oleh masyarakat yang mengandung dua sifat pokok yaitu non-rival dan non-excludable. Sedangkan kebijakan *privat goods* merupakan kebijakan yang menyediakan barang atau pelayanan untuk pasar bebas.

Sholichin Abdul Wahab dalam (Taufiqurokhman, 2014) telah merinci kebijakan tersebut kedalam beberapa kategori yaitu :

a. Tuntutan Kebijakan (*Policy Demands*)

Yaitu tuntutan atau desakan yang diajukan pada pejabat-pejabat pemerintah yang dilakukan oleh aktor-aktor lain, baik swasta maupun kalangan pemerintah itu sendiri dalam sistem politik untuk melakukan tindakan tertentu atau sebaliknya untuk tidak melakukan Tindakan pada suatu masalah tertentu. Tuntutan ini bervariasi, mulai dari desakan umum, agar pemerintah berbuat sesuatu hingga usulan untuk mengambil tindakan konkrit tertentu terhadap suatu masalah yang terjadi didalam masyarakat.

b. Keputusan Kebijakan (*Policy Decisions*)

Merupakan keputusan yang telah dibuat oleh pejabat-pejabat pemerintah yang diperuntukan untuk memberikan arah terhadap pelaksanaan kebijakan publik. Dalam hal ini, termasuk didalamnya keputusan-keputusan untuk menciptakan statuta (ketentuan-ketentuan dasar), ketetapan-ketetapan, ataupun membuat penafsiran terhadap undang-undang.

c. Pernyataan Kebijakan (*Policy Statements*)

Adalah suatu pernyataan yang resmi atau penjelasan mengenai kebijakan publik tertentu, atau dengan kata lain merupakan suatu hal tentang kebijakan publik yang telah/ akan dilakukan oleh pemerintah. misalnya: ketetapan MPR, Keputusan presiden atau dekrit presiden, Keputusan peradilan, pernyataan ataupun pidato pejabat pemerintah yang menunjukkan hasrat, tujuan pemerintah, dan apa yang ingin dikerjakan oleh pemerintah.

d. Keluaran Kebijakan (*Policy Outputs*)

Merupakan wujud dari kebijakan publik yang paling dapat dirasakan dan dapat dilihat, karena menyangkut hal-hal yang senyatanya dilakukan guna merealisasikan apa yang telah digariskan dalam keputusan dan pernyataan kebijakan. Secara singkat keluaran kebijakan ini menyangkut apa yang ingin dikerjakan oleh pemerintah.

e. Hasil Akhir Kebijakan (*Policy Outcomes*)

Yaitu suatu akibat atau dampak yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat baik yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan. Sebagai konsekuensi dari adanya tindakan maupun tidak adanya Tindakan dari para pejabat pemerintah dalam bidang-bidang atau masalah-masalah yang ada dalam masyarakat.

Dari definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan serangkaian keputusan kebijakan yang diambil oleh seseorang atau kelompok untuk mewujudkan tujuan-tujuan tertentu di dalam masyarakat.

Terdapat beberapa definisi efektivitas menurut para ahli yaitu pengertian efektivitas menurut Gibson (2002) yang mengatakan bahwa "Efektivitas merupakan pencapaian sasaran yang telah disepakati atas usaha bersama". Efektivitas dapat diartikan sebagai kemampuan suatu unit untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Efektivitas menurut Emerson (1996) mengatakan bahwa efektivitas merupakan suatu pengukuran dalam tercapainya tujuan dan ketepatan sasaran yang telah ditentukan, karena suatu program dapat dikatakan efektif apabila tujuan tersebut telah tercapai.

Efektivitas menurut Sutrisno (2007) mengatakan bahwa efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang telah dilakukan serta sejauh mana menghasilkan keluaran yang sesuai dengan yang telah diharapkan. Sutrisno (2007) mengungkapkan bahwa terdapat 5 dimensi untuk mengukur tingkat efektivitas yaitu :

a. Pemahaman program

Pemahaman berasal dari kata paham yang memiliki arti mengerti sedangkan pemahama yaitu suatu proses perbuatan cara memahami. Pemahaman program dapat diartikan sebagai suatu program yang direalisasikan sehingga dapat dengan mudah diterima dan dipahami oleh masyarakat.

b. Tepat sasaran

Dalam menentukan keberhasilan sebuah program ketepatan sasaran merupakan indikator yang penting untuk dinilai karena penentuan dari sasaran suatu program yang tepat dapat menentukan keberhasilan dari efektivitas program yang sedang dijalankan.

c. Ketepatan waktu

Indikator tepat waktu berhubungan dengan sesuai atau tidaknya waktu penyelesaiannya, apakah sesuai dengan target waktu yang telah direncanakan sejak awal, karena suatu program dapat dikatakan efektif jika dapat melaksanakan program sesuai dengan waktu yang telah ditentukan

d. Tercapainya tujuan

Dalam indikator ini tercapainya tujuan merupakan suatu pencapaian program yang telah dilaksanakan dapat tercapai sesuai dengan tujuan program.

e. Perubahan nyata

Pada indikator perubahan nyata merupakan sebuah dampak yang dapat dirasakan oleh para penerima program, jika terdapat perubahan yang lebih baik maka program tersebut dapat dikatakan berhasil.

Dari definisi diatas dapat dikemukakan bahwa efektivitas merupakan suatu konsep yang mampu memberikan gambaran tentang sebuah keberhasilan dalam suatu lembaga untuk mencapai sasarannya. Selanjutnya untuk mengetahui tercapainya tujuan dalam suatu program yang dibutuhkan ukuran efektivitas untuk mengukur keberhasilan program.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Pliken, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, dengan pertimbangan metodologis yang komprehensif. Pemilihan lokasi didasarkan pada karakteristik demografis dan sosial-ekonomi, di mana Desa Pliken tercatat memiliki jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) tertinggi di Kecamatan Kembaran, sehingga berpotensi memberikan kontribusi signifikan terhadap kajian implementasi program pemberdayaan masyarakat. Subjek penelitian mencakup dua kategori informan kunci: (1) masyarakat penerima manfaat PKH di Desa Pliken, dan (2) para pemangku kepentingan program, meliputi pendamping PKH dan koordinator kecamatan. Pemilihan informan dilakukan secara purposive, mengacu pada kriteria kemampuan informan memberikan informasi substantif dan mendalam terkait fokus penelitian.

Penelitian menggunakan pendekatan metodologis deskriptif kualitatif merujuk pada kerangka metodologi Creswell (2007), dengan desain studi kasus menurut perspektif Helaludin & Hengki Wijaya (2019). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui triangulasi metode, mencakup observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Sumber data komprehensif meliputi data primer yang diperoleh langsung dari lapangan dan data sekunder dari dokumen resmi dan publikasi terkait.

Analisis data dilaksanakan dengan pendekatan studi kasus interpretatif, memungkinkan pengkajian fenomena secara holistik dan kontekstual guna menghasilkan temuan yang bermakna dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah..

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Pliken Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas, alasan memilih lokasi tersebut karena desa pliken memiliki penerima bantuan PKH tertinggi di Kecamatan Kembaran. Teknik pemilihan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling yaitu teknik yang digunakan untuk memilih informan yang dianggap dapat memberikan informasi sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh peneliti. Informan utama pada pementian ini adalah koordinator kecamatan, sedangkan informan pendukung terdiri dari pendamping PKH dan penerima manfaat PKH di Desa Pliken Kecamatan Kembaran Kabupaten banyumas.

Fokus penelitian ini adalah Efektivitas Program Keluarga Harapan di Desa Pliken Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas. Fokus penelitian tersebut dipilih peneliti karena peneliti ingin mendeskripsikan secara mendalam proses pemahaman program, tepat sasaran, ketepatan waktu, tercapainya tujuan dan perubahan nyata dalam Program Keluarga Harapan di Desa Pliken, sehingga nantinya angka kemiskinan dapat menurun.

1. Hasil Penelitian

a. Pemahaman program

Menurut Sutrisno (2007) mengatakan bahwa pemahaman berasal dari kata paham yang memiliki arti mengerti sedangkan pemahaman yaitu suatu proses perbuatan cara memahami. Pemahaman program dapat diartikan sebagai suatu program yang direalisasikan sehingga dapat dengan mudah diterima dan dipahami oleh masyarakat. Hal ini juga dimaksudkan ketika program yang dijalankan dapat dengan mudah dan efektif dalam proses pelaksanaannya pihak yang perlu memahami ini adalah semua pihak yang terlibat dalam proses kegiatan program tersebut.

Dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) diperlukan adanya sosialisasi program yang dilakukan oleh pendamping PKH kepada masyarakat. Sosialisasi program dalam efektivitas Program Keluarga Harapan sangat penting, karena jika sosialisasi program tidak disampaikan dengan baik maka akan terjadi ketidakjelasan dan ketidaktahuan mengenai sebuah program yang akan dijalankan. Berdasarkan hasil wawancara menilai bahwa sosialisasi pemahaman program yang disampaikan oleh pendamping PKH kepada masyarakat sudah cukup baik dan diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat penerima PKH mengenai Program Keluarga Harapan.

b. Tepat Sasaran

Menurut Sutrisno (2007) menjelaskan bahwa sasaran dalam indikator ini merupakan hal yang perlu ditinjau secara langsung akan keberadaan program. karena keberadaan program yang dirancang apakah sudah sesuai dengan aturan yang telah ditentukan sebelumnya. suatu program dikatakan efektif apabila program sesuai dengan sasaran yang telah ditentukan sejak awal.

Dalam menentukan sebuah keberhasilan dalam suatu program ketepatan sasaran merupakan indikator yang penting untuk dinilai karena sasaran yang tepat dapat menentukan keberhasilan dari efektivitas program yang sedang dijalankan. Berdasarkan hasil wawancara menilai bahwa Program Keluarga Harapan di Desa Pliken dapat dikatakan efektif dalam mencapai sasaran yang telah ditentukan yaitu datanya sudah sesuai dengan DTKS dan memiliki kriteria yang telah ditentukan oleh pemerintah.

c. Ketepatan Waktu

Menurut Surisno (2007) ketepatan waktu merupakan indikator tepat waktu yang berhubungan dengan sesuai atau tidaknya waktu penyelesaiannya, apakah sesuai dengan target waktu yang telah direncanakan sejak awal, karena suatu program dapat dikatakan efektif jika dalam pelaksanaannya tepat dengan waktu yang telah ditentukan sebelumnya. waktu merupakan hal yang sangat penting dalam suatu proses kegiatan, ketepatan waktu dalam hal ini dimaksudkan untuk melakukan sebuah pengukuran apabila dikatakan efektif jika pelaksanaan kegiatan/program sesuai dengan aturan waktu. Semakin tepat pada saat pelaksanaan program maka semakin efektif program dapat terealisasi.

Dalam ketepatan waktu suatu program dapat dikatakan efektif jika dapat melaksanakan program sesuai dengan operasional waktu yang telah ditentukan. Berdasarkan hasil wawancara dapat dinilai bahwa dalam aspek ketepatan waktu pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Pliken sudah sesuai dengan standart waktu yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Banyumas.

d. Tercapainya Tujuan

Menurut Sutrisno (2007) dalam indikator ini tercapainya tujuan merupakan suatu pencapaian program yang telah dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sejak awal dapat dicapai. Dalam aspek tercapainya tujuan yaitu sejauh mana hasil pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) sesuai dengan tujuan yang ditentukan sebelumnya. berdasarkan hasil wawancara menilai bahwa dalam aspek tercapainya tujuan sudah dapat dikatakan tercapai atau berhasil karena para penerima manfaat merasa bahwa dengan adanya bantuan PKH dapat mengurangi pengeluaran dan dapat memenuhi kebutuhan mereka untuk mengakses fasilitas Pendidikan dan fasilitas kesehatan.

e. Perubahan nyata

Menurut Sutrisno (2007) mengukur keefektifan dengan memberikan perubahan yang nyata, dimaksudkan bahwa aturan yang telah ditentukan sejak awal pada program ini dapat terealisasikan dengan baik sesuai dengan rencana. Perubahan nyata juga dapat diartikan sebagai sebuah dampak yang dapat dirasakan oleh para penerima bantuan PKH, jika terdapat perubahan yang lebih baik maka program tersebut dapat dikatakan berhasil.

Perubahan nyata yang dimaksud yaitu melihat sejauh mana Program Keluarga Harapan (PKH) dapat memberikan dampak kepada masyarakat , jika terdapat perubahan yang lebih baik dari sebelumnya maka program tersebut dapat dikatakan berhasil. Berdasarkan hasil wawancara dapat dinilai bahwa masyarakat yang menerima bantuan PKH merasa terbantu dengan adanya program tersebut karena cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka untuk menyekolahkan anak-anak.

2. Pembahasan

a. Pemahaman Program

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara bahwa dalam aspek pemahaman program yaitu dengan melihat komponen yang berada didalamnya, salah satunya yaitu dari sosialisasi program. dalam segi sosialisasi program mengenai Program Keluarga Harapan (PKH) kepada calon penerima manfaat PKH yang dilakukan di masing-masing kelompok PKH yang telah ditentukan dan dibentuk disetiap Rukun Tangga (RT) yang dilaksanakan oleh pendamping PKH Desa Pliken Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas sudah cukup baik dan dapat dikatakan berhasil, hal ini dapat dilihat dari segi kejelasan dan konsistensi sosialisasi program keluarga harapan, hal tersebut dapat dikatakan berhasil karena para calon penerima manfaat yang menerima bantuan surat undangan pertemuan awal merasa terbantu dengan adanya sosialisasi program yang telah disampaikan oleh pendamping PKH sehingga mereka dapat mengerti tentang apa itu bantuan PKH dan digunakan untuk apa saja dana itu digunakan.

Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa sosialisasi pada tahap pelaksanaan PKH sangat penting untuk keberhasilan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Pliken Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas. Keberhasilan dari sosialisasi pelaksanaan PKH melibatkan pendamping PKH dan masyarakat umum, hal ini nyata telah membawa kesuksesan karena bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dapat di sosialisasikan kepada para penerima manfaat PKH.

b. Tepat Sasaran

Berdasarkan kesimpulan hasil observasi dan wawancara bahwa dalam ketepatan sasaran yaitu dengan melihat komponen yang ada didalamnya yaitu penerima bantuan yang sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Pada aspek ini peneliti menemukan bahwa keseluruhan penerima manfaat yang telah mendapatkan bantuan sudah sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan oleh pemerintah dan sesuai dengan data yang ada di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dimana masyarakat yang masuk dalam DTKS memang benar-benar dari golongan keluarga tidak mampu dan para penerima PKH sudah masuk dalam kriteria dan memiliki komponen yaitu mulai dari ibu hamil/balita, siswa sd/ sederajat, smp/ sederajat, sma/ sederajat, lansia dan penyandang disabilitas berat.

Berdasarkan pembahasan diatas, peneliti menemukan bahwa dalam aspek ketepatan sasaran di Desa Pliken memang sudah tepat karena masyarakat yang mendapatkan bantuan PKH sudah masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan memiliki komponen yang diperlukan sebagai syarat untuk menerima bantuan PKH.

c. Ketepatan Waktu

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian bahwa untuk menganalisis ketepatan waktu yaitu dengan melihat komponen yang ada didalamnya yaitu dari aspek pelaksanaan program yang sesuai dengan standart operasional waktu yang telah ditetapkan. Pada aspek ini peneliti menemukan bahwa pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Pliken telah memenuhi standart waktu yang telah ditentukan oleh pemerintah Kabupaten Banyumas yaitu pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) ini dimulai pada tahun 2013.

Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam aspek ketepatan waktu di Desa Pliken dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Pliken sudah sesuai dengan standart waktu yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang dimulai pada tahun 2013. Oleh karena itu, dalam hal ketepatan waktu semua orang yang terlibat dalam pelaksanaan program PKH telah memenuhi waktu yang ditentukan oleh pemerintah Kabupaten Banyumas.

d. Tercapainya Tujuan

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian bahwa untuk menganalisis tercapainya tujuan yaitu dengan melihat komponen yang berada didalamnya yaitu proses tercapainya suatu program dengan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. pada aspek ini peneliti menemukan bahwa

Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Pliken sudah sesuai dengan tujuan dari PKH yang meliputi peningkatan taraf hidup penerima manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial, mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan, menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian para penerima PKH dalam mengakses layanan fasilitas kesehatan fasilitas pendidikan serta kesejahteraan sosial, dan dapat mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada para penerima PKH.

Berdasarkan pembahasan diatas peneliti menemukan bahwa dalam aspek tercapainya tujuan di Desa Pliken sudah tercapai karena melihat masyarakat yang mendapatkan bantuan PKH kian mandiri dalam mengakses fasilitas kesehatan dan pendidikan serta merasakan kesejahteraan setelah mendapatkan bantuan PKH.

e. Perubahan Nyata

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian untuk menganalisis perubahan nyata yaitu dapat dilihat dari manfaat dan juga dampak yang dirasakan oleh penerima manfaat PKH. Pada aspek ini peneliti menemukan bahwa seluruh keluarga yang menerima bantuan PKH telah merasakan manfaat dan dampak yang positif setelah menerima bantuan PKH, masyarakat penerima manfaat PKH merasa terbantu dengan adanya bantuan tersebut untuk mengurangi beban pengeluaran mereka untuk mengakses layanan kesehatan dan pendidikan.

Berdasarkan pembahasan diatas peneliti menemukan bahwa dalam aspek perubahan nyata di Desa Pliken pada saat dilaksanakannya Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Pliken Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas telah memberikan manfaat dan dampak yang positif kepada masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial sehingga para penerima manfaat merasa terbantu dengan adanya bantuan sosial PKH yang di luncurkan oleh pemerintah.

Berdasarkan hasil dan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa bantuan Program Keluarga Harapan di Desa Pliken Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas sudah berjalan dengan baik sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya. Bantuan PKH juga berdampak positif untuk masyarakat penerima PKH dalam indikator pendidikan dan kesehatan serta dapat memperbaiki per ekonomian Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Pliken Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas, dapat disimpulkan bahwa program tersebut telah menunjukkan kinerja yang cukup signifikan dalam mencapai tujuan pemberdayaan masyarakat miskin:

1. Pemahaman Program, menunjukkan bahwa pihak pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) ditingkat kecamatan telah memahami fungsi dan tanggung jawabnya, selain itu para Keluarga Penerima Manfaat (KPM) juga telah memahami Program Keluarga Harapan (PKH) dan apa saja manfaat yang akan didapatkan oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setelah menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).
2. Tepat Sasaran, sudah dapat dikatakan efektif dalam mencapai sasaran yang telah ditentukan sebelumnya yaitu sesuai dengan data yang diperoleh dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan para Keluarga Penerima Manfaat (KPM) juga memiliki kriteria atau komponen penerima Program Keluarga Harapan (PKH) yang meliputi Ibu Hamil/Balita, Anak usia Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Lansia dan Penyandang Disabilitas Berat.
3. Ketepatan Waktu, menunjukkan bahwa di Desa Pliken Kecamatan Kembaran telah melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH) sesuai dengan standart waktu yang telah ditentukan oleh

pemerintah Kabupaten Banyumas yang mulai dilaksanakan pada tahun 2013 yang diikuti oleh seluruh desa di Kabupaten Banyumas.

4. Tercapainya Tujuan, sudah berjalan dengan baik karena para Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sudah dapat mengakses layanan kesehatan dan Pendidikan dan dengan adanya bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) juga telah mengurangi beban pengeluaran para Keluarga penerima Manfaat (KPM) sehingga dapat merasakan kesejahteraan sosial.
5. Perubahan Nyata, dapat dikatakan efektif karena telah mampu memberikan perubahan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sehingga dapat merasakan manfaat dan dampak yang positif dari bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam mengurangi beban pengeluaran untuk mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta membuat Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sadar akan pentingnya kesehatan dan Pendidikan untuk anak.

Keterbatasan Penelitian:

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan metodologis yang perlu diperhatikan, antara lain: (1) ruang lingkup penelitian terbatas pada satu desa, sehingga generalisasi hasil mungkin tidak dapat sepenuhnya diterapkan pada konteks yang berbeda; (2) metode pengumpulan data yang digunakan masih bersifat kualitatif deskriptif, sehingga tidak dapat mengukur secara kuantitatif seluruh aspek efektivitas program; (3) keterbatasan waktu penelitian tidak memungkinkan dilakukannya pengamatan longitudinal untuk melihat perkembangan program dalam jangka panjang.

Saran Penelitian Lanjutan:

Berdasarkan temuan dan keterbatasan penelitian, disarankan beberapa langkah untuk penelitian selanjutnya:

1. Melakukan studi komparatif dengan desa-desa lain di Kabupaten Banyumas untuk memperoleh perspektif yang lebih komprehensif.
2. Mengembangkan metodologi penelitian yang menggabungkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif untuk analisis yang lebih mendalam.
3. Melaksanakan penelitian longitudinal guna mengamati perkembangan program dalam jangka panjang.
4. Mengeksplorasi faktor-faktor eksternal yang memengaruhi keberhasilan implementasi Program Keluarga Harapan.

Kontribusi Teoritis dan Praktis:

Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan dalam memahami implementasi Program Keluarga Harapan di tingkat basis, menghasilkan model evaluasi kebijakan sosial yang komprehensif, dan menyediakan rekomendasi empiris bagi pengambil kebijakan dalam merancang intervensi penanggulangan kemiskinan yang lebih efektif dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Cahyono Tri Budi, 2022, *Pendidikan Dan Penelitian Calon Kepala Sekolah Untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan*, Tangerang, Pascal books.
- Helaludin, Wijaya Hengki, 2019, *Analisis Data Kualitatif Sebuah Tujuan Teori Dan Praktik*, Jakarta Timur, Sekolah Tinggi Theologia Jaffaray.
- Meutia Fitri Intan, 2017, *Reformasi Administrasi Publik*, Bandar Lampung, Aura Cv. Anugrah Utama Raharja.

Panjaitan Raja Mulia Tua Doli, Pardede Kristian Darma Piki, 2021, *Administrasi Publik*, Purbalingga, Eureka Media Aksara.

Taufiqurakhman, 2014, *Kebijakan Publik Pendelegasian Tanggung Jawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintah*, Jakarta Pusat, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama (pers).

Jurnal

Bakulu Brayen, Pangkey Masje, Kolondam Helly, Efektivitas Program Keluarga Harapan Sektor Pendidikan Di Desa Hatetabako Kecamatan Wasile Tengah Kabupaten Halmahera Timur, Vol. 7. No. 101. April 2021.

Gumilar Restu, Efektivitas Pengembangan Hasil Pertanian Dalam Peningkatan Pangan Di Kabupaten Pangandaran, Vol. 2. No. 3. September 2023.

Melati, Zulkarnaini, Efektivitas Program Bantuan Sosial Tunai Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kelurahan

Internet.

Badan Pusat Statistik, Presentase Penduduk Miskin 2022 Turun Menjadi 9,54 Persen, diakses tanggal 25 Februari 2023, dari <https://www.bps.go.id/presentase/2022/07/15/1930/presentase-penduduk-miskin-maret-2022-turun-menjadi-9-54-persen.html>.

Badan Pusat Statistik, Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa) Menurut Kabupaten Kota 2021-2022, diakses tanggal 16 Februari 2023, dari <https://www.bps.go.id/indicator/23/619/1/jumlah-penduduk-miskin-ribu-jiwa-menurut-kabupaten-kota.html>.

Badan Pusat Statistik Banyumas, Penduduk Miskin Kabupaten Banyumas 2020-2022, diakses tanggal 24 Januari 2023, dari <https://banyumaskab.go.id/indicator/23/82/1/penduduk-miskin-kabupaten-banyumas.html>.

Badan Pusat Statistik Jawa Tengah, Kemiskinan 2020-2022, diakses tanggal 25 Februari 2023, dari <https://jateng.bps.go.id/indicator/23/34/1/kemiskinan.html>.

Cnbcindonesia.com, Orang Miskin RI Turun, Ini Lima Penyebabnya!, diakses tanggal 7 Januari 2024, dari <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230718074328-4-455199/orang-miskin-ri-turun-ini-lima-penyebabnya/amp>.

Dikominfo Jateng, Kuartal I 2022, Jumlah Orang Miskin Di Jateng Turun 102,57 Ribu, diakses tanggal 24 Januari 2023, dari <https://jatengprov.go.id/publik/kuartal-i-2022-jumlah-orang-miskin-di-jateng-turun-10257-ribu/>.

Dinsos.bulelengkab.go.id, <https://dinsos.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel-masalah-sosial-tentang-kemiskinan-93>.

Suara Merdeka Banyumas, Jumlah Warga Miskin Banyumas Meningkatkan Akibat Pandemi Covid-19, diakses tanggal 24 Januari 2023, dari

<https://banyumas.suameredeka.com/banyumas/pr-093234594/jumlah-warga-miskin-banyumas-meningkat-akibat-pandemi-covid-19>.

Suara Merdeka Banyumas, Penduduk Banyumas Capai 1,8 Juta Jiwa Lebih, Terbesar ada di Kecamatan Ini, diakses tanggal 8 Februari 2024, dari <https://banyumas.suameredeka.com/banyumas/0911205962/penduduk-banyumas-capai-18-juta-jiwa-lebih-terbesar-ada-di-kecamatan-ini>.

Trimio Yulianto, Memahami Kembali Strategi Pengentasan Kemiskinan di Indonesia, diakses tanggal 3 Februari 2023, dari <https://djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/sulteng/id/data-publikasi/berita-terbaru/2830-memahami-kembali-strategi-pengentasan-kemiskinan-di-indonesia-sebagai-sumber-penerimaan-negara,html>